

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AB Kusuma, RM, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Ackerman, Susan Rose, 1999, *Corruption and Government, Causes, Consequences, and Reform*, Canbridge University, United Kingdom
- Albrow, Martin, 2005, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ananta Noor, Pramoedya, dkk, 1999, *Kronik Revolusi Indonesia Jilid I (1945)*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Asrun, Muhammad, 2004, *Krisis Peradilan, Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta.
- Asmara, Galang, 2005, *Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendertal Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal  
Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konpress, Jakarta.

\_\_\_\_\_, dkk, 2006, *Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara  
Langsung*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Atmadja, I Dewa Gede, 2012, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi  
Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang.

Atmasasmita, Romli, 2004, *Seputar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek  
Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia, Studi Perbandingan  
Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan  
Malaysia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Basyaib, Hamid, dkk, 2006, *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia,  
Buku 1*, Yayasan Aksara, Jakarta.

Bedner, Adriaan, *Administrative Court in Indonesia: a Socio-Legal Study*

Blau, Peter & Marshall W Meyer, 1987, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, UI,  
Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta.

Chehabi, Houchang E & Juan J Linz 1998, *Sultanistic Regimes*,

Crouch, Harold, 1978, *Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press,  
Cornell

- Chalid, Hamid & Abdi Kurnia Johan, 2010, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman: Orde Lama, Orde Baru & Era Reformasi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Davidson Soren, Vishnu Juwono, David G Timberman, 2007, *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006; Laporan Survei tentang Kebijakan dan Pendekatan pada Tingkat Nasional*, CSIS dan USINDO, Jakarta.
- Deni, Saiful, 2010, *Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan & Tindakan dalam Administrasi Publik*, Naufan Pustaka, Yogyakarta.
- Dipodisastro, Soemarno, 1997, *Tritura dan Hanura, Perjuangan Menumbangkan Orde Lama dan Menegakkan Orde Baru*, Yanense Mitra Sejati, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK; Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 1999, *Reformasi Aparatur/Administrasi Negara Pasca Pemilu 1999*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan, Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan (Introduction to the Law of Crime Prevention)*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, Bandung.
- D. Darimurti, Khrisna, 2012, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah: Kajian mengenai Konsep, Dasar, Pengujian, dan Sarana Kontrol*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- D Yahya, Lip, 2004, *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira, Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia periode 1950-1959*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fiorina, Morris P, 1994, *Divided Govenment in the America States*
- Ghafar, Affan, 1999, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghoffar, Abdul, 2009, *Pebandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hakim, Lukman, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, 1985, *Korupsi : dalam Proyak Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Haris, Syamsudin, 2009, *Dilema Presidensialisme di Indonesia Pasca Orde Baru dan Urgensi Penataan Kembali Relasi Presiden-DPR*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Harman, Benny Kabur, 1997, *Konfigurasi Politik Kekuasaan Kehakiman*, Elsam, Jakarta.

Hartiningsih, Maria, 2011, *Korupsi yang Memiskinkan*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.

Harum Pudjiarto, St, 1994, *Politik Hukum UU Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Hasibuan, Albert, 1997, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Hendra Noer, Hamka, 2014, *Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia, Studi Zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Hefner, R.W, 2000, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*, Priceton; Princeton University Press.

Heilbrun, John R, 2004, *Anti-Corruption Commissions: Panacea or Real Medicine to Fight Corruption*, World Bank Institute, Washington DC.

Hiariej, Eddy.O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.

Hikam, Muhammad A.S, 1998, *Pemilu dan Legitimasi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Hornby, A.S, et. all, 1963, *The Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London.

HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

- Huda, Ni'matul, 1999, *Hukum Tata Negara (Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Konstitusi Indonesia)*, PSH FH UII, Yogyakarta.
- Huntingthorn, Samuel P, 1991, *The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century*,
- Huskens, Frans & Huub de Jonge (eds), 2003, *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*, LKIS, Yogyakarta.
- Ilmar Aminudin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Intrans Publishing, Malang.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Istanto, F Sugeng, *Politik Hukum (Kumpulan Materi Kuliah)*, Sekolah Pascasarjana UGM, tanpa penerbit, Yogyakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Joeniarto, 1996, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kadir Besar, Abdul, 2005, *Pancasila, Refleksi Filsafati, Transformasi Ideologi, Niscaya Metode Berfikir*, Pustaka Azhary, Jakarta.

- Kansil, C.S.T. 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional
- Khan, Hamid, *Principles of Administrative Law, A comparative Study*, Oxford University, Oxford
- Klitgaard, Robert, 1998, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, dkk, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Komisi Hukum Nasional, 2014, *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, KPK, Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2013, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kumar, Ranjit, 1999, *Research Methodology: a Step by Step Guide for Beginners*, Addison Wesley Longman Australia Pty, Limited Melbourne.
- Kuncoro, Purbopranoto, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Kusnardi, Moh & Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI, Jakarta.
- Latif, Abdul & Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loebis, A.R, 2001, *Belantara Kebangsaan*, Jendela, Yogyakarta.
- Lubis, Mochtar & James C Scoot (ed), 1977, *Etika Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta.

Mahfud MD, Mohammad, 2003, *Demokrasi dan Konstitusionalisme di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Jilid I*, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

\_\_\_\_\_, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II*, Seketratiat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Manan, Bagir, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII & Gama Media, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2003, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marbun, S. F & Moh Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.



Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

McIntyre, Angus, 2005, *The Indonesian Presidency, The Shift From Personal toward Constitutional Rule*, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham USA.

Mehden, Fred R Von Der, 1987, *Politik Negara-negara Berkembang (Politics of Developing Nations)*

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Mubyarto, 1977, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Keadilan*, Yayasan Agro Ekonomika, Jakarta.

Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre Jakarta.

\_\_\_\_\_ & Barda Nawawi Arief, 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Muliadi, Ahmad, 2013, *Politik Hukum*, Akademia Permata, Padang.

Mustafa, Bachsan, 1990, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muzaffar, Chandra, 1986, *Wabah Korupsi dalam Seri Wawasan Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.

- M. Chalmers, David, 1975, *Encyclopedia Americana*, Americana Corporation, New York.
- M Hadjon, Philipus, 1985, *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*, Djumali, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, dkk, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesia Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Najib, Muhammad & Kuat Sukardiono, 1998, *Amien Rais Sang Demokrat*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Na'im, Moh Masyhuri, dkk, *NU Melawan Korupsi, Kajian Tafsir dan Fiqh*, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PB NU, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung, 1992, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959*, Grafiti, Jakarta.
- Nasution, A.H, 1955, *Tjataan Sekitar Politik Militer Indonesia*, CV Pembimbing, Jakarta.
- Natabaya, H.A.S, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Nugraha, Safri, dkk, 2006, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Administrasi Negara*, BPHN, Jakarta.
- Pamungkas, Sri Bintang, 2001, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*, Erlangga, Jakarta.
- Poejosoebroto, Santoso, 1964, *Pemberantasan Subversi, Korupsi, dan Penetriran Sewa Menyewa Rumah, Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta.

- Pope Jeremy, 2000, *Confronting Corruption: The Elements of A National Integrity System*, Transparency International
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi Hukum & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,
- Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, dan Abdul Hakim Barakatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pringgodigdo, AG, 1981, *Tiga Undang-Undang Dasar*, PT Pembangunan, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projodikoro, Wirjono, 1979, *Azas-azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta
- Quah, Jon S. T, 2015, *The Critical Importance of Political Will in Combating Corruption in Asian Countries*, Public Administration and Polices
- Quah, Jon S. T, 2015, *The Normalisation of Corruption: Why It Occurs and What Can Be Done to Minimise It*, United Nations: Departement of Economic and Social Affairs, Division for Public Administration and Development Management
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rinaldi, Taufik, dkk, 2007, *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi, Suatu Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah, Justice for The Poor*, Bank Dunia, Jakarta.
- Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Jakarta.
- Sahr, K and Hors, I (Ed), *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries*, UNDP/OECD, New York.
- Said, M. Mas'ud, 2007, *Birokrasi di Negara Birokratis*, UMM Pres, Malang.
- Saleh, K Wanttjik, 1977, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia, Jakarta.
- Salman, Otje & Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Setiyono, Budi, 2012, *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*, Nuansa, Bandung.
- Simorangkir, J.C.T, 1983, *Tentang dan Sekitar Dewan Perwakilan Rakyat*, Erlangga, Jakarta.
- Sjoekor, Abdoel, 1998, *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Era Pemerintahan Soeharto*, Yayasan Pustaka Grafiti, Jakarta.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Soehino, 2010, *Politik Hukum di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Soekedy, 2003, *KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) di Tengah Gurita*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

- Soemantri, Sri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soepomo, 1965, *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soyomukti, Nurani, 2016, *Soekarno dan NASAKOM*, Garasi, Yogyakarta.
- Steinberg, Sheldon S & David T Austern, 1999, *Government, Ethic, and Managers, Penyelewengan Aparat Pemerintahan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sucipta, Mahendra, 2010, *Transkrip Rahasia Hasil Sadapan KPK*, PT Suka Buku Kita, Jakarta.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudomo, 1982, *Peranan Operasi Tertib dalam Pengawasan Pembangunan*, Sekretariat Kopkamtib, Jakarta.
- Sugeng, Istanto F, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Sousa, Luis de, 2010, *Anti-Corruption Agencies: Betwen Emporwement and Irrelevance, Crime Law and Social Change*
- Sujata, Antonius, dkk, *Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dan Masa Mendatang*, Komisi Obudsman Nasional, Jakarta.
- Suharto, Susilo, 2006, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sumali, 2003, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)*, UMM Press, Malang.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Sundhaussen Ulf, 1982, *The Road of Power: Indonesia Military Politics 1945-1967*, Oxford University Press, Kota?

\_\_\_\_\_, 1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, LP3S, Jakarta.

Sunny, Ismail, 1983, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.

Syaukani, Imam & A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S Lev, Daniel, *Lembaga Elit dan Kontrol*

Tanya, Bernard L, 2011, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Taylor, Robert H (ed), 1996, *The Politics of Elections in Southeast Asia*

The United Nations, 1996, *The United Nations and Vrime Prevention*, United Nations, New York.

Thoha, Miftah, 1987, *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara Jilid II*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Matapena Institute, Yogyakarta.

Trady, Gregory, 2011, *The Theory and Practice of Law*, Carswell, Kanada.

T Kahin, George Mc, 1970, *Nasionalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca and London.

Utrecht, E, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Van Apeldoorn, LJ, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta.

Vatikiotis, M, 1993, *Indonesian Politics Under Soeharto: Order, Development and Pressure for Change*, Routledge, London.

Wahyono, Padmo, 1985, *Penjabaran Pancasila dalam Peraturan Perundangan*, Niagara, Jakarta.

Waterbury, John, 1976, *Corruption, Political Stability and Development: Comparative Evicence from Egypt*, Government and Opposition, Marroco.

Xarim, Masyhudulhaq, 1976, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Biro Sejarah Prima, Medan.

Yamin, Mohammad, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid 1, Yayasan Prapandja, Jakarta.

Yusuf, Aly, 2005, *Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla*, The Indonesian Institute

Yusuf, Slamet Effendy & Umar Bassalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia: Perubahan Pertama UUD 1945*, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta.

Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Tesis, Disertasi**

A Rachman, Aulia, 2007, *Sistem Pemerintahan Presidensial Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945: Studi Ilmiah tentang Tipe Rezim, Tipe Institusi*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.

Djamin, Alaoedin, 1963, *The Administration of Public Enterprise in Indonesia*, Disertasi, School of Public Administration, University of Southern California.

Feith, Herbeth, 1961, *Indonesian Politics 1949-1957, The Decline of Representative Government*, Disertasi, Cornel University.

Juwono, Vishnu, Berantas Korupsi, 2016, *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia 1945-2014*, Disertasi, Departement of International History (Departemen Sejarah Internasional), The London School of Economics and Political Science.

Pompe, Sebastian, 1996, *The Indonesian Supreme Court, Fifty Years of Judicial Development*, Dissertation, Leiden University, Leiden.

Ramli, Srie Honorai, *Establishing Civilian Supremacy in Indonesia*, Thesis, University of Montana.

S. Attamimi, A. Hamid, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Univeritas Indonesia.

Saiful, Teuku, 2005, *Efektivitas Komisi Ombudsman Nasional dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Wijayanto, Indung, 2008, *Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kota Semarang)*, Tesis, Universitas Diponegoro.

## **Jurnal**

Abdulai, Abdul-Gafaru, 2009, Political will in combating corruption in Developing and Transition Economic: A Comparative Study of Singapore, Hongkong, and Ghana, *Journal of Financial Crime*, Vol. 16, No. 4, 2009.

Adji, Indriyanto Seno, Problematika Korupsi & Antisipatinya Melalui Sistem Hukum (Pidana), *Media Hukum*, Vol. 2 No. 8, Persatuan Jaksa RI, Jakarta.



Andi Pandanto, Aryojati, 2015, Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla, Vol. VII, No. 20/II/P3DI/Oktobre/2015, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI.

Azhar, Kasim, “Perilaku Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, Vol. XII, No. 1, Januari, 2004.

Bolongaita, Emil P, Why Indonesia’s Anti-Corruption Commission succeeds where other don’t a comparison with the Philippines’ Ombudsman, *U4 Issue*, August 2010, No. 4.

Brinkerhoff Derick W, “Assessing Political Will for Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework”, *Public Administration and Development*, 2000.

Casabona, Carlos Maria Romeo, 2011, “Criminal Policy and Legislatives Techniques in Criminal Law on Biotechnology”, *revue internationale de droit Penal* 2011/1 (Vol. 82).

Klinken, Gerry van, Indonesia’s Politically Driven Anti-Corruption Agenda and the Post Election Future, *The Asia Pasific Journal*, Volume 7, Issue 15, number 2, April 2009.

Kotze, L.J, 2004, *The Application of Just Administrative Action in the South African Environmental Governance Sphere: An analysis of Some Contemporary Thoughts and Recent Jurisprudence*, Volume 7 No. 2, P.E.R. Journal ISSN 1727-3781.

Liddle, R William, 1985, Soeharto’s Indonesia: Personal Rule and Political Institutions, *Pacific Affairs*, 58 (1)

- Mackie, J.A.C, 1970, *The Commission of Four Report on Corruption*, Bulletin of Indonesia Economic Studies
- M. Smith, Theodore, “*Corruption, Tradition, and Change*”, Indonesia, No. 11, April 1971, Cornell University.
- Pauker, Guy J, The Role of Political Organization in Indonesia, *Far Eastern Survey*, Vol. 27. No. 9, 1958.
- Quah, Jon S. T, 2009, Combating Corruption in The Asia Pacific Countries: What Do We Know and What Need to be Done?, *International Public Management Review*, Volume 10 Issue 1.
- Robert, Fiona-Snape, 1999, Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesia, *Third World Quality*, Vol. 20, No. 3.
- Sherlocks, Stephen, 2002, *Combating Corruption in Indonesia? The Ombudsman and the Assets Auditing Commission*, Bulletin of Indonesia Economic Student, Vol. 38 No. 3, 2002.
- Soemantri, Sri, “Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya dalam Kehidupan Bernegara”, *Jurnal Demokrasi dan HAM*, Vol. 1, No. 4, September, 2011.
- Suseno, Agung, Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 17 No. 1, Januari-April, 2010.
- Syuraida, Hikmatus, Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Era Orde Lama hingga Era Reformasi, Atavara, *E-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol. 3 No. 2, Juli 2015, Universitas Negeri Surabaya.

Tinker, Irene and Milidge Walker, 1959, Indonesia's Panacea: 1959 Model, *Far Easterns Survey*, Vol. 28. No. 12 (Dec. 1959), University of California Press.

Wulansari, Eka Martiana, Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang, *Jurnal Rechtsvinding Online*, tanpa tahun.

### **Kamus**

Poerwadarminta, W.J.S., 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia.

### **Majalah dan Surat Kabar**

Badoh, Fahmi Ibrahim, Visi Misi Antikorupsi Capres, *KOMPAS*, 6 Juni 2014.

Keliat, Makmur, Selama Korupsi Ada, Jangan Harap Ada Negara, *KOMPAS*, 6 November 2009.

Isra, Saldi, Simalakama Sistem Presidensial, *KOMPAS*, 27 November 2008.

Majalah Historia, edisi nomor 2 tahun 2012

Syawawi, Reza, 2017, Korupsi Proyek Strategis, *KOMPAS*, 8 APRIL 2017.

Trijono, Lambang, Etika Penyelenggara Negara, *Kedaulatan Rakyat*, 14 November 2017.

### **Makalah, Proceeding**

Alim, Hifdzil, 2014, *Pendidikan Antikorupsi*, Boyolali, 7 Oktober 2014.

Arief, Barda Nawawi, Strategi Kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia dan Analisis terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971, Makalah 30 Juli 1998.

Firnandus, Alberto Ferry, 2015, *Pemerintahan Presiden B.J Habibie (1998-1999)*

*Kebijakan Politik Dalam Negeri*, Universitas Sanata Dharma.

Probohudono, Agung Nur, dkk, *Usulan Penggabungan BPKP, Itjen, dan Bawasda*

*untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dalam Rangka Mengurangi*

*Praktik Korupsi di Indonesia*, Prosiding Simposiom Nasional Akuntasi (SNA)

XVIII Indonesia Banking School, September 2015.

Quah, Jon S. T, 2013, *Curbing Corruption in Singapore: The Importance of*

*Political Will Expertise, Enforcement, and Context*, Makalah dalam Panel

*Diskusi Different “Paths to Curbing Corruption: Lessons from Denmark, New*

*Zaeland, and Singapore”* at the Eight Annual Conference of the Asian Studies

Association of Hong Kong at the Hong Kong Institute of Education in Shatin,

Hong Kong on March 8-9, 2013.

Makalah, Seminar Nasional, *Meluruskan Jalan Reformasi, Merumuskan Pilar-*

*pilar Pemandu Bangsa*, Balai Senat Universitas Gadjah Mada, 25-27

September 2003.

Surbaksi, Natangsa, *Mengurai Akar Masalah Korupsi dan Strategi*

*Penanggulangannya di Indonesia*, Prosiding Musyawarah Nasional Luar Biasa

dan Seminar Nasional (MUNASENA) Masyarakat Hukum Pidana dan

Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bekerja sama dengan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 8-10 September 2013.

Mukthie Fajar, Abdul, 2002, *Reformasi Konstitusi dalam Transisi Paradigmatik*,

Pidato Pengukuhan Guru Besar, 13 Juli, FH Universitas Brawijaya, Malang

Pidato Soekarno, 1959, UUD 45 dan Manifesto Politik RI, Penemuan Kembali  
Revolusi Kita, Pidato Presiden RI, 17 Agustus 1959.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Konstitusi RIS 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Dasar 1945 Pra Amandemen.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai  
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan  
Perundangan Republik Indonesia.

TAP MPRS No. XLIII/MPPRS/1968 tentang Penjelasan Ketetapan MPRS No. IX  
/MPRS/1966.

TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

TAP MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

TAP MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan  
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan  
Perundang-undangan.

TAP MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan  
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 1/1959.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan  
dan Pencegahan Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1962.

Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1966.

Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967.

Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1967.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968.

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1968 tentang Pembentukan Inspektorat  
Jenderal Departemen Keuangan.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1969 tentang Pembentukan Inspektorat  
Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1970.

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983.

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974.

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Koordinasi Pengendalian dan  
Pengawasan Pembangunan.

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPKPN dan  
Sekjend KPKPN.

Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan  
Lembaga Ombudsman.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2009.

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009.

Peraturan Penguasa Militer (PPM) Nomor 6/1957.

Peraturan No. Prt/Peperpu011/1958.

Peraturan No. Prt/Peperpu013/1958.

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan  
Korupsi.

Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi  
Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara No. Kep-327/A/JA/06/2002  
dan Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara No.  
15/Kep/K.KPKPN/9/2002.

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: Kep-102/J.A/05/2000.



### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-IX/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014.

### **Laporan**

Catatan Masyarakat Sipil tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, Kemitraan bagi Tata Pembaharuan Pemerintahan (*Partnership*), 2014

Laporan Tahunan KPK, Tahun 2004.

Laporan Tindak Lanjut Kementerian Keuangan atas Inpres Nomor 1 Tahun 2011.

Laporan Tim Pengawasan DPR terhadap Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia

Angket DPR tentang Pengusutan Kasus Bank Century, September 2014.

Laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Laporan UN, Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty First Century “ Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 2000.

Laporan UN, “Crime Preventine in the Context of Development”, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, 1985.

Laporan UN, “Crime Trends and Crime Prevention Strategies”, Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1980.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pembentukan UU No. 3 Tahun 1971,  
Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman.

**Lain-Lain.**

Maklumat Wakil Presiden Nomor X, 16 Oktober 1945.

Spinellis, Dinoysios, 1994, Crime of Politicians in Office (or “Top Hat Crime”),  
General Report for the Round Table Discussion at the XV Congress of Penal  
Law).

“Social Aspect of Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of  
Development”, Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and  
the Treatment of Offenders, 1990.

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

United Nations Guidelines for the Prevention of Crime Economic and Social  
Council Resolution, 2002/13, Annex.

Visi Misi dan Program Aksi SBY-JK “Membangun Indonesia yang Aman, Adil,  
dan Sejahtera.

Visi Misi dan Program Aksi SBY-Boediono, “Membangun Indonesia yang  
Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”

Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla “Jalan Perubahan untuk Indonesia  
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”.